



AhaSlides

RENSTRA

TAHUN 2025-2026



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan dokumen ini. Diharapkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ba'a, Januari 2024

Kesela Dinas Kominfo.Kab. Rote Ndao,



Pauwili J. J. Nggili, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19810725 200604 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KOMINFOSTATPER KABUPATEN ROTE NDAO.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kominfostatper	7
2.2 Sumber Daya Kominfostatper	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kominfostatper a	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOMINFOSTATPER	27
3.1 Permasalahan Pelayanan Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao	27
3.2 Isu-isu Strategis Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kominfostatper Tahun 2025-2026	29
4.2 Cascading kinerja Kominfostatper	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATN DAN SUBKEGIATAN,SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
7.1 Target Tujuan dan Sasaran Renstra Kominfostatper Tahun 2025-2026	38
7.2 Target Kinerja Pelenggaraan Urususan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui IKK	39
BAB VIII PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Keadaan PNS Kominfostatper Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Keadaan PNS Kominfostatper Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kominfostatper Berdasarkan Pangkat, Golongan dan JabatanTahun 2024	17
Tabel 2.4	Jumlah Tenaga Kontrak Kominfostatper Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	18
Tabel 2.5	Daftar Aset Kominfostatper Tahun 2023.....	19
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Kominfostatper Tahun 2019-2024	22
Tabel 2.7	Capaian Renstra Kominfostatper Tahun 2019-2024	23
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran, Indikator Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao	29
Tabel 4.2	Cascading Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	36
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kominfostatper yang mengacu pdaTujuan dan Sasaran RPD	38
Tabel 7.2	Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kominfosatper Tahun 2025-2026 melalui IKK	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominformatper) Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
- 19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;
- 20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kominformatper selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan:
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan:
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)
- 3.2 Isu Strategis
Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- 4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kominformatper Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, ditetapkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok: **“membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kominformatper merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Kominformatper, mempunyai Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang yakni Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

2. Sekretaris

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Analis Keuangan Pusat/Daerah (Keuangan dan Aset)
- c. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).

3. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

- a. Kepala Seksi (Pelayanan Informasi);
- b. Kepala Seksi (Jaringan Komunikasi dan Kemitraan);
- c. Kepala Seksi (Peliputan dan Dokumentasi).

4. Bidang Informatika

Bidang Informatika membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

- a. Kepala Seksi (Teknologi dan Informasi);
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Penyiaran dan Pengelolaan Informasi); dan
- c. Kepala Seksi (Sub Koordinator Substansi).

5. Bidang Statistik

Bidang Statistik, membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

- a. Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi);
- b. Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Statistik Produksi) dan
- c. Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi).

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian, membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

- a. Sandiman Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi)
- b. Sandiman Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Hubungan Komunikasi Sandi) dan
- c. Sandiman Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pembinaan Persandian).

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- c. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan Analisis jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
- f. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Kominformatikper membawahi Sekretaris, Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Sekretaris membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset), Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan tugas kesekretariatan meliputi Kepegawaian dan Umum, Keuangan dan Aset serta Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahunan

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

- d. mengkoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
- f. mengkoordinir pelaksanaan budaya kerja dan kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) dan Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

3. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Komunikasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian . Kepala Bidang komunikasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan komunikasi dan kemitraan media serta peliputan dan komunikasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kominformatper Kabupaten Rote Ndao. Bidang Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Komunikasi pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta membuat rencana operasional di Bidang Komunikasi, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Koordinator Substansi Pelayanan informasi, Sub Koordinator Substansi Jaringan komunikasi dan kemitraan media dan Sub Koordinator Substansi Peliputan dan dokumentasi. Bidang Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan langkah-langkah Bidang Komunikasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional kegiatan pelayanan informasi, jaringan komunikasi, kemitraan media serta peliputan dan dokumentasi).

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi
- e. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/ kegiatan dengan atasan langsung/ instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, professional dan bermoral.
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Komunikasi membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Substansi Pelayanan informasi, Sub Koordinator Substansi Jaringan komunikasi dan kemitraan media dan Sub Koordinator Substansi Peliputan dan dokumentasi.

4. Bidang Informatika

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Informatika yang bertanggung jawab kepada Kepala DiskominfoStatper. Bidang Informatika mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan informatika melalui teknologi dan informasi, penyiaran dan pengelolaan informasi serta pengendalian telekomunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Rote Ndao.

Bidang Informatika mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Informatika, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Koordinator Substansi Teknologi dan Informasi, Sub Koordinator Substansi Penyiaran dan pengelolaan informasi dan Sub Koordinator Substansi Pengendalian telekomunikasi dan Informatika. Bidang Informatika mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan langkah-langkah Operasional Bidang Informatika berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kebutuhan Infrastruktur dasar Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan

internet,dan penggunaan akses internet, layanan manajemen dan informasi E Government, Integritas layanan Publik dan pemerintahan;

- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang infrastruktur Dasar, Data Center (DC), Disaster Discovery Center (DRC) dan Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintahan Kabupaten, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen dan informasi E-Government, Integritas layanan Publik dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem, Teknologi Informasi komunikasi Smart Kabupaten, layanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan kegiatan penyelenggaraan E-Government Chief Information Officer (GCIO);
- f. Merencanakan langkah-langkah penyusunan (norma, standar,prosedur). Kriteria penyelenggaraan di Bidang layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegritas, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart Kabupaten, layanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan E-Government Chief Information Officer (GCIO), Pemerintah Daerah Kabupaten, pengembangan Daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten serta layanan secara elektronik; dan
- g. Mengkoordinasikan urusan Teknologi Informasi, penyiaran dan pengelolaan informasi, pengendalian telekomunikasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Substansi Teknologi dan Informasi, Sub Koordinator Substansi Penyiaran dan pengelolaan informasi dan Sub Koordinator Substansi Pengendalian telekomunikasi dan Informatika.

5. Bidang Statistik

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik yang bertanggung jawab kepada Kepala Kominfostatper. Kepala Statistik mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan statistik melalui statistik sosial, statistik produksi serta statistik distribusi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Agar berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bidang Statistik mempunyai tugas membuat rencana operasional di Bidang Statistik, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengkaji, menganalisa, mengevaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan meliputi Sub Koordinator Substansi Statistik Sosial, Sub Koordinator Substansi Statistik Produksi dan Sub Koordinator Substansi Statistik Distribusi. Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Statistik berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan urusan Statistik Sosial, Statistik Produksi dan Statistik Distribusi;
- d. Menyiapkan data dan Statistik daerah/ sektoral sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan data statistik;
- f. Menyampaikan bahan pengelolaan data dan statistik sebagai bahan penetapan kebijakan; dan
- g. Melaksanakan dan menyusun data dan statistik sektoral skala daerah dan jejaring statistik khusus.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator Substansi Statistik Sosial, Sub Koordinator Substansi Statistik Produksi dan Sub Koordinator Substansi Statistik Distribusi.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Persandian yang bertanggung jawab kepada Kepala KominfoStatper. Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN persandian melalui pengamanan informasi, hubungan komunikasi dan pembinaan persandian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan kepada seluruh unit koordinasi organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Rote Ndao.

Bidang Persandian mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Persandian, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Koordinator Substansi Pengamanan informasi, Sub Koordinator Substansi Hubungan komunikasi sandi dan Sub Koordinator Substansi Pembinaan persandian. Bidang Persandian mempunyai fungsi:

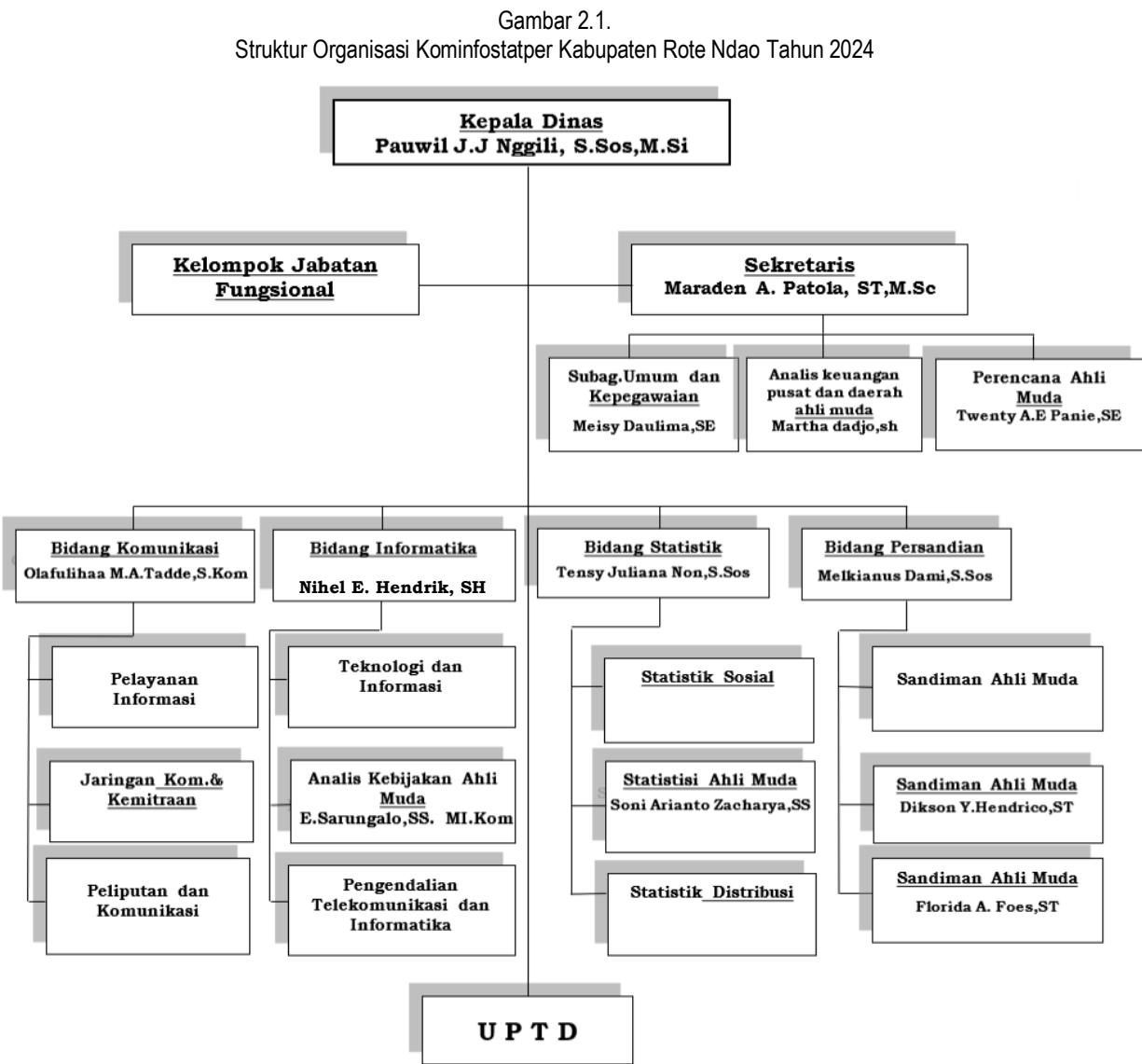
- a. Merencanakan langkah-langkah Operasional Bidang Persandian berdasarkan rencana kerja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- c. Merencanakan kebutuhan penyediaan infrastruktur Persandian;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pengamanan Informasi, Hubungan Komunikasi sandi dan Pembinaan Persandian;
- e. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Sandi Negara dalam rangka Operasional sistem Persandian di Daerah yang menyangkut dengan layanan Keamanan Informasi *E-Government* dan layanan persandian serta sistem Komunikasi antar pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan urusan pengamanan Informasi, hubungan Komunikasi Sandi, Pembinaan Persandian; dan
- g. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, Profesional dan bermoral.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Persandian membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Substansi Pengamanan informasi, Sub Koordinator Substansi Hubungan komunikasi sandi dan Sub Koordinator Substansi Pembinaan persandian.

2.1.2. Struktur Organisasi Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:



Sumber data: Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

2.2. Sumber Daya Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional serta yang melaksanakan kegiatan Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Januari 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Kominfostatper sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat

dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3, sedangkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 7 (Tujuh) orang berdasarkan data per 31 Desember 2023.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kominformatper Kab. Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	-	-	-
2	IV/a	Pembina	2	2	4
Jumlah Golongan IV			2	2	4
3	III/d	Penata Tk I	3	3	6
4	III/c	Penata	2	1	3
5	III/b	Penata Muda Tk I	2	-	2
6	III/a	Penata Muda	2	6	8
Jumlah Golongan III			9	10	19
7	II/d	Pengatur Tk. I	1	-	1
8	II/c	Pengatur	1	-	1
9	II/b	Pengatur Muda Tk. I/II B	-	1	1
Jumlah Golongan II			2	1	3
TOTAL			13	13	26

Sumber Data : Kominformatper Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan keadaan pegawai Kominformatper Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kominformatper Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	-	-	-
2	S2	2	1	3
3	S1	7	9	16
4	D III	2	-	2
5	SLTA/SMK	2	3	5
Total		13	13	26

Sumber Data : Kominformatper Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 3 (tiga) orang, S1 berjumlah 16 (enam belas) orang, DIII berjumlah 2 (dua) orang dan SLTA/SMK berjumlah 5 (lima) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai Kominformatper Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Pauwil J. J. Nggili, S.Sos, M.Si 19810725 200604 1 018	Pembina / IV A	Kepala Dinas
2	Maraden A. Patola, ST, M.Sc 19810330 200802 1 001	Penata Tk. I / III D	Sekretaris
3	Olafulihaa M. A. Tadde, S.Kom 19820416 200604 2 028	Pembina/ IV A	Kabid Komunikasi
4	Nihel E. Hendrik, SH 19711121 200501 1 008	Penata Tk. I / III D	Kabid Informatika
5	Melkianus Dami, S.Sos 19790812 2005 1 012	Pembina/ IV A	Kabid Statistik
6	Tensy J. Non, S.Sos 19740730 200604 2 013	Pembina/ IV A	Kabid Persandian
7	Meisy M. Daulima, SE 19790506 200604 2 012	Penata Tk. I / IIID	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Martha Dadjo, SH 19810503 200701 2 009	Penata / III C	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
9	Tuwenti A. E. Panie, SE 196750820 200701 1 017	Penata / III C	Perencana Ahli Muda
10	Florida A. Foes 19810424 200803 2 003	Penata Tk. I / III D	Sandiman Ahli Muda
11	Endekan Sarungallo, SS, M.Ikom 19731117 201001 2 007	Penata Tk. I / III D	Analisis Kebijakan Ahli Muda
12	Dikson Yandry Hendrico, ST 19840124 201001 1 017	Penata Tk. I / III D	Sandiman Ahli Muda
13	Soni Arianto Zacharya, S.S 19860411 201101 1 016	Penata / III C	Statistisi Ahli Muda
14	Mus Mbolik 19720808 200312 1 006	Penata Muda Tk. I / III B	Analisis Sistem Informasi
15	Harun Napu 19751112 199903 1003	Penata Muda Tk. I / III B	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
16	Selfinciana D. Thene 19840918 200312 2 003	Penata Muda / IIIA	Pengadministrasi Kepegawaian
17	Serly Yunita Adu, S.Ikom 19900906 202012 2 004	Penata Muda / IIIA	Pengelola Teknologi Informasi
18	Jefri Mabilaka, S.Sos 19880711 202203 1 003	Penata Muda / IIIA	Analisis Berita
19	Maria I. T. Mario, S.Stat 19970422 202203 2 003	Penata Muda / IIIA	Analisis Statistik
20	Paramita S. Menoh, S.Kom 19881005 202203 2 004	Penata Muda / IIIA	Analisis Statistik
21	Mahalia D. V. Rihi Ga, S.Ikom 19970105 202203 2 008	Penata Muda / IIIA	Analisis Berita
22	Semi B. Nauk 19770905 201406 1 006	Penata Muda / IIIA	Analisis Sistem Informasi
23	Henny S. Lesik 19800627 200701 2 010	Penata Muda / IIIA	Bendahara

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
24	Jonas N. Messakh 19770220 200701 1 008	Pengatur Tk. I / IID	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
25	Yakobus I. Nessi, A.Md 19900128 202203 1 005	Pengatur / IIC	Operator Sandi dan Telekomunikasi
26	Syeny Y. Z. Tonak 19810103 201406 2 007	Pengatur Muda Tk. I / IIB	Penata Liputan

Sumber Data : Kominfostatper Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak Kominfostatper Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Budihartono Mooy	Sopir	1	-	1
2	Risky A. Bedaona	Penjaga malam	1	-	1
3	Debby P. M. E. Poyck, SE	Tenaga Administrasi	-	1	1
4	Os On Tole'u	Cleaning Service	1	-	1
Total			3	1	4

Sumber Data: Kominfostatper Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menduduki jabatan penjaga kantor sebanyak 1 (satu) orang, cleaning service sebanyak 1 (satu) orang, sopir 1 (satu) orang, tenaga administrasi 1(satu) orang dan semuanya merupakan titipan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

2. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Dinas /mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan aset berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) unit berdasarkan data per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5.
Daftar Aset KOMINFO Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

N0	JENIS BARANG /NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN	UNIT	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Station wagon	Toyota/Avanza	2010	1	Baik
2	Station wagon	Pick up strada	2015	1	Rusak
3	Sepeda motor	Honda/Revo Fit FI	2017	1	Baik
4	Sepeda motor	Honda/Revo Fit F1	2017	1	Baik
5	Sepeda motor	Honda New Beat CW	2017	1	Baik
6	Sepeda motor	Honda/Vario	2017	1	Baik
7	Air Conditioner 0,5 PK	Polytron /PAC 05 VX	2017	2	Baik
8	Lap Top	Acer/i3-5005U	2017	3	Rusak berat
9	Printer	Epson/L 360 , Epson L 220	2017	2	Rusak
10	Stavolt 1.000 N	Matsunaga/SVC-1000 N	2017	3	Baik
11	Wireless Router	TP-LINK/TLWA751)N	2017	1	Rusak Berat
12	UPS	ICA/CE 1200	2017	2	
13	Camera	Nikon/D5300-18-55VR II KIT	2017	1	Rusak
14	Digital audio tape Recorder	Sony/ICD-PX470,4 GB	2017	1	Baik
15	Genset	220Volt, 5000 watt	2017	1	Rusak berat
16	Papan Nama Instansi	Ukuran 75x100 cm pipa gb 1,5 dim atap seng	2017	1	Baik
17	Papan Nama Ruangan/Jabatan	Ukuran 1.20 cm x 2,40 cm, bingkai	2017	1	Baik
18	Tandon Air	2.300 liter	2017	1	Baik
19	Laptop	Acer/LCD 14", core i3 dan Asus	2017	2	Rusak berat
20	Komputer Multimedia /Editing	Layar lebar LED 16.intel core i5 quadcore	2017	1	Baik
21	Komputer	-	2017	1	Rusak berat
22	Hardisk internal	1 TB	2017	1	Baik
23	Hardisk Eksternal	-	2017	2	-
24	Printer	Infus pabrik	2017	2	Rusak
25	Scaner	A4	2017	1	Baik
26	Faximile	Digital ansuring	2017	1	Baik
27	Layar Proyektor	XVGA 3300 Ansi,HDMT	2017	1	Rusak
28	Drone	DJ phantom 4,mass speed 45 mph (72kph) dan Drone explorer mini,diagonal motor 225 mm	2017	2	Rusak berat
29	Switcher/Menara Antena Lain	-	2017	2	Rusak
30	Kursi Ruang Tunggu Tamu	Waiting Chair/Stainless Steel	2017	1	Rusak ringan
31	Lemari Arsip	Kayu Jati 2 pintu	2017	2	Baik
32	Rak Buku	Kayu Jati 4 susun	2017	2	Baik
33	Mesin Fax	Panasonic/KX-FT 987 CX	2018	1	Baik
34	Lap Top	Asus/ W402 W	2018	1	Rusak
35	Hard Disk	-	2018	1	Baik
36	Amplifier	JMK JK-620VA	2019	1	Baik
37	Personal Komputer	Dell T30	2019	1	Rusak Berat
38	Laptop	Asus UN34481	2019	1	Rusak
39	Printer	Epson L120	2019	1	Baik
40	Hardisk Eksternal	Maxtron 1 TB USB 3.0	2019	1	Baik
41	Switcher VGA	Figear Switch 4 Port FJ 15 4	2019	1	Baik
42	Tripod Camera	Excell/Light standar	2019	1	Baik
43	Kabel VGA	VGA Kabel 3+4 (50 meter)	2019	1	Baik
44	Kabel CCTV	Kabel CCTV Video audio power	2019	1	-
45	Tenda Pameran (Tenda Besi)	-	2020	16	Baik
46	Laptop	Asus	2020	1	Rusak
47	Komputer	Asus	2020	1	Baik
48	Kamera	Canon	2020	1	Baik
49	GPS	Garmin	2020	1	Baik
50	Router Wifi	Tenda AC6AC1200	2020	1	Baik
51	Laptop	Acer	2020	1	Baik
52	Tripot Handycam besar	Weifing WT-717	2020	1	Rusak
53	Webcam Logitech	Tripot 3110	2020	1	-
54	Personal Computer	Asus	2020	1	Baik
55	Scanner	Epson	2020	1	Baik
56	Printer	Epson	2020	1	Baik
57	Proyektor	Epson	2020	1	Baik

N0	JENIS BARANG /NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN	UNIT	Ket
1	2	3	4	5	6
58	Camera	Canon/DSLR	2020	1	Baik
59	Jammer	Oppo	2020	1	Baik
60	Kacamata Kamera	Oppo	2020	1	Baik
61	BalpoinKamera	Oppo	2020	3	Baik
62	Gantungan Kunci Kamera	Oppo	2020	3	Baik
63	Hand Phone	Nokia	2020	1	Rusak
64	Televisi LED	Polytron	2020	1	Baik
65	Laptop	Asus	2021	1	Rusak
66	Printer	Epson	2021	1	Baik
67	Adaptor Laptop	Acer	2021	1	Rusak
68	AC	Polytron	2022	1	Baik
69	Laptop	Acer	2022	3	Baik
70	Komputer PC	Lenovo	2022	4	Baik
71	Laptop	MSI	2022	3	Baik
72	Printer	Epson	2022	4	Baik
73	Hardisk External	-	2022	1	Baik
JUMLAH				114	

Sumber Data: DiskominfoStatper Kab. Rote Ndao Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut

TABEL 2.6. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPELITBANG TAHUN 2021-2023																
INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET SPM	TARGE T IKU 2	TARGET IKK 3	TARGET INDIKA TOR 4	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		V			1.18	1.34	1,50	1.66	1.00	1.34	2.48	2.99		100.00	165.33	180.12
Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah		V			2.17	2.17	100.00	100.00	-	2.17	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00
Layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang diimplementasikan		V			11.59	11.59	50.72	100.00	-	11.59	50.72	50.72		100.00	100.00	50.72
Tersedianya sistem data dan statisik yang terintegrasi (Rote Satu Data)		V			Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	tersedia		Belum Tersedia	Belum Tersedia	tersedia
Jumlah aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi		V			-	-	23.80	69.23	-	23.08	51.22	79.64		-	215.21	115.04
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		V			-	-	-	90.00	-	-	-	99.90		-	-	111.00
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)		V			-	-	-	70.00	-	-	-	76.76		-	-	109.66
Presentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem satu Data		V			-	-	-	70.00	-	-	-	88.88		-	-	126.97
Presentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi		V			-	-	-	69.23	-	-	-	100.00		-	-	144.45
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			V		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			V		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten			V		-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00		-	-	100.00
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			V		-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00		-	-	100.00
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			V		-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00		-	-	100.00
Tingkat keamanan informasi pemerintah			V		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	8		9		10		13		14		15	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100 %	2,649,421,430	100 %	5,052,346,000	100 %	2,973,702,000	100	2,162,179,724	100	2,556,043,976	100	2,207,984,775
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %		100 %		100 %		100		100		100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	19 Dok	10,000,000	19 Dok	10,500,000	19 Dok	12,550,525	19	31,956,800	19	19,944,800	19	12,550,400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dok	5,000,000	12 Dok	5,500,000			12	28,963,400	12	16,959,000		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dok	10,080,660					12	10,080,600
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7 Dok	5,000,000	7 Dok	5,000,000			7	2,993,400	7	2,985,800		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Lapo ran	2,469,865					7	2,469,800
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	26 Org/ Bln	1,748,000	27 Org/ Bln	3,794,546,000	27 Org/ Bln	2,103,800,708	26	1,694,383,094	27	1,902,603,456	27	2,024,013,025
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bula n	1,720,686,400	27 Org/ Bln	1,888,546,000			14	1,626,857,094	27	1,831,555,456		
		Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bula n	1,700,000,000		1,855,000,000			12					
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Org/ Bln	2,037,535,988					27	1,957,749,025
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	5 Org	48,000,000	4 Org	51,000,000			5	67,526,000	4	71,048,000		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dok	66,264,720					1	66,264,000
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Bln	9,000,000	2 Org/ Bln	9,900,000	1 Dok	9,960,000	2	9,980,000	2	9,959,000	1	9,960,000
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	2 Bln	9,984,000	2 Org/ Bln	9,960,000			2	9,980,000	2	9,959,000		
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dok	9,960,000					1	9,960,000
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	12 Bln	305,000,000	8 Org/ Bln	325,000,000			0	75,000,000	8	75,000,000		
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bln	50,000,000	12 Bln	55,000,000								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	3 org	150,000,000	3 org	165,000,000								
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	12	105,000,000	8 Org/ Bln	105,000,000			8	75,000,000	8	75,000,000		
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	373,523,430	100 %	444,000,000	100 %	116,907,844	100	267,683,080	100	436,824,020	100	107,380,100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48 Bua h	10,000,000	41 Buah	11,000,000			48	2,651,000	41	2,052,050		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Pake t	2,047,950					1	2,047,950
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	50,000,000	17 Unit	55,000,000			11	52,827,200	17	187,082,800		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					8 Pake t	77,974,911					8	77,830,000

9	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	2 Pake t	21,063,430	2 Pake t	30,000,000			2	45,355,000	2	21,052,000		
		Tersedianya Alat Tulis Kantor												
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Bula n	21,064,000					12	21,802,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bula n	10,000,000	12 Bula n	11,000,000	12 Bula n	10,120,800			12	35,033,250		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Pake t	9,000,000	2 Pake t	11,000,000			155	49,999,830	155	26,240,470		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Pake t	5,700,183					2	5,700,150
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	27 Kali	250,000,000	14 Kali	300,000,000			27	116,850,050	14	165,363,450		
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					10 Lapo ran	94,526,000					10	60,133,000
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	3 unit	50,000,000	3 unit	55,000,000								
10	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3 unit	50,000,000	3 unit	55,000,000								
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	49,716,000	100 %	88,400,000	100 %	-	100	47,620,800	100	53,546,700	100	-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	319 Lem bar	4,048,000	209 Lem bar	4,000,000			319	4,048,000	209	3,991,000		
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat					440 lem bar	3,996,000					440	3,996,000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air	12 Bula n	4,640,000	12 Bula n	6,000,000			42					
		Jumlah Belanja Listrik	6600 KWH	11,800,000		18,000,000			6600	43,572,800		49,555,700		
		Jumlah Langganan Internet	12 Bula n	9,228,000		38,400,000			12					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					12 Bula n	52,604,000					12	56,559,100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	20,000,000	2 unit	22,000,000		-		-		-		
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	104,170,000	100 %	135,402,000	100 %	61,550,000	100	35,555,950	100	58,166,000	100	54,081,250
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	6 Unit	3,850,000	6 Unit	3,850,000			6		6		6	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	13,320,000	2 Unit	16,000,000			2	35,555,950	2	58,166,000	2	
		Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	3000 liter	30,000,000	540 liter 000	54,552,000			3000		54000		54000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					6 Unit	61,550,000					6	54,081,250
15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	10 Unit	9,000,000	11 Unit	11,000,000								
16	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bula n	48,000,000	12 Bula n	50,000,000								

II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	100 %	46,000,000	100 %	46,460,000	100 %	25,513,000	100	46,000,000	100	37,140,700	100	25,508,000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka Waktu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	12 Bula n	46,000,000	12 Bula n	46,460,000	12 Bula n	25,513,000	12	46,000,000	12	37,140,700	12	25,508,000
17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dok	46,000,000	35 kont en	46,460,000	50 kont en	25,513,000	46	46,000,000	25	37,140,700	100	25,508,000
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya layanan informatika daerah	100 %	267,999,900	100 %	300,000,000	100 %	223,327,960	100	-	100	293,337,900	100	223,270,000
	Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informatika daerah dan kegiatan bidang informatika (%)	163 Dok	267,999,900	175 Dok	300,000,000	3 apli kasi	223,327,960	0	-	0	293,337,900	3	223,270,000
18	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan, Aplikasi Donor Darah Rote dan Aplikasi Permata (Project Generasi Emas Rote) 2045	100 %	135,000,000	100 %	150,000,000	3 aplik asi	127,327,960					3	127,270,000
19	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	63 %	132,999,900	75 %	150,000,000	100 %	96,000,000			100	293,337,900	100	96,000,000
IV	PROGRAM STATISTIK	Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data	100 %	327,500,000	100 %	475,000,000	100 %	38,160,000		0	100	106,443,300	100	38,159,000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Data Statistik Sektoral	100 %	197,500,000	100 %	275,000,000	100 %	24,072,500		0	100	53,221,650	100	24,072,000
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100 %	40,000,000	100 %	100,000,000	1 dok	10,600,500			100	34,754,900	1	10,600,000
21	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	9 buku	90,000,000	10 buku	100,000,000	1 dok	3,487,000			10	18,466,750	1	3,487,000
22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Data Center dan Layanan Statistik Sektoral	100 %	67,500,000	100 %	75,000,000	56 org	9,985,000					56	9,985,000
V	PROGRAM PERSANDIAN	Meningkatnya Keamanan Informasi	100 %	371,997,500	100 %	350,000,000	100 %	23,990,000	100	54,771,000	100	179,119,900	100	23,990,000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menigkatnya Keamanan Informasi	100 %	371,997,500	100 %	350,000,000	100 %	23,990,000	100	54,771,000	100	179,119,900	100	23,990,000
23	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif	1 Perda	182,000,000	1 Perda	200,000,000	1 dok	13,949,000			1 perda	179,119,900	1	13,949,000
24	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Org	135,000,000	3 org	150,000,000	12 Lap	10,041,000					12	10,041,000
25	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	54,997,500					100	54,771,000				
			100 %	3,662,918,830	100 %	6,223,806,000	100 %	3,284,692,960	100	2,262,950,724	100	3,172,085,776	100	2,518,911,775

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama tahun 2021-2023 dengan capaian di atas 97% dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100% untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti BPS, dan lain-lain.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belum lengkapnya kerangka regulasi sebagai pijakan penyelenggaraan Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	Belum lengkapnya regulasi dalam bentuk perda atau perbup penyelenggaraan KISP
			Belum tersedian peraturan turunan dalam bentuk SK, dan SOP dalam penyelenggaraan KISP
			Belum tersedianya perencanaan strategis dalam penyelenggaraan KISP
			Masih rendahnya keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kerangka regulasi KISP
		Belum memadainya aspek Manajemen dan tata Kelola penyelenggaraan	Belum memadainya sarana pendukung (infrastruktur TIK)
			Belum terpenuhinya kualitas sumber daya manusia pengelola komunikasi, informatika, statistik dan persandian (tenaga programer dan sandiman bersertifikat)
			Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan infromatika, statistik dan persandian
		Belum Optimalnya layanan utama penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Belum optimalnya ketersediaan layanan aplikasi informatika (baru tersedia 22 layanan)
			Belum maksimalnya pemanfaatan layanan diseminasi informasi dari aspek penggunaan maupun jumlah informasi yang diupload (PPID)
			Masih rendahnya awareness akan pentingnya kemanan informasi dalam aktifitas pemerintahan dan publik Belum maksimalnya pemanfaatan layanan satu data

		Belum memadainya aspek Manajemen dan tata Kelola penyelenggaraan	Belum memadainya sarana pendukung (infrastruktur TIK)
			Belum terpenuhinya kualitas sumber daya manusia pengelola komunikasi, informatika, statistik dan persandian (tenaga programer dan sandiman bersertifikat)
			Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan infromatika, statistik dan persandian

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perencana dan Peneliti
2. Peningkatan kualitas data perencanaan Pembangunan daerah
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan Pembangunan daerah
4. Optimalisasi perencanaan berbasis *e-planning*
5. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan noasional.
6. Peningkatan inovasi dalam perencanaan Pembangunan daerah
7. Perenapan kelitbangan untuk menjawab permasalahan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 antara lain Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan public.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1													
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kominfostatper Kabupaten Rote Ndao													
NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	SPM/IKKI/LAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					REALISASI	TARGET	2023	2024	
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik												
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif didukung oleh Teknologi dan Informasi			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan pelaksanaan SPBE (Permenpan no 5 /2018)		2.99	3.00	3.03	3.05	3.05
			Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian		99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
				Meningkatnya pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE (Permenpan no. 5/2018)		2.60	2.75	2.90	3.10	3.10
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik		80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
					Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	Jumlah PD yang terintegrasi dalam sistim satu data / Jumlah Total PD x 100		79.55	90.91	95.45	100.00	100.00
					Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	Jumlah aplikasi PD yang menerapkan keamanan informasi / Jumlah seluruh aplikasi PD x 100		82.76	85.00	87.00	92.00	92.00

4.2. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2026										
TUJUAN	SASARAN		PPROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA			UNIT KERJA/BIDANG
1	2		3	4		5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	99.90	99.90	99.90	99.90	Sekretariat
				Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	%	100	100	100	100	
				Presentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	
				Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	19	19	19	38	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	12	12	24	
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	7	14	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Org/Bln	26	26	26	26	
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	26	26	26	26	
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1	1	1	2	
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	1	1	1	100	
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	1	1	2	
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	13	13	13	26	
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	6	
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	4	
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	2	
		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	Lembar	440	400	400	800	
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	2	
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	14	
		13	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	11	12	13	25	
		14	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	Unit	1	1	1	2	
		Meningkatnya pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2.75	2.9	3.1
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	85	90	95	95	
				Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	90.90909091	95.454545	100	100	
				Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	85	87	92	92	

		II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Penyebarluasan	%	100	100	100	100	Bidang Komunikasi
		7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		%	100	100	100	100	
		15	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Dokumen	12	12	12	24	
		III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Layanan Informasi Daerah		%	100	100	100	100	Bidang Informatika
		14	Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Informasi Daerah dan Kegiatan Bidang Informatika		Dokumen	1	1	1	2	
		35	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan, Aplikasi Donor Darah Rote dan Aplikasi Permata (Project Generasi Emas Rote) 2045		Aplikasi	3	3	3	6	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		%	100	100	100	100	
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		%	100	100	100	100	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		%	100	100	100	100	
			Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah	Prosentase SPBE		%	70	70	100	100	
		IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORA	Meningkatnya Pengelolaan/Pemanfaatan Rote Satu Data							Bidang Statistik
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Bulan	12	12	12	12	
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Penyediaan Metadata Statistik Sektoral		Buku	12	12	12	24	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pengelolaan dan Pengembangan Data Center dan Layanan Statistik Sektoral		%	100	100	100	100	
			Pembinaan Sistem Informasi Statistik Sektoral			%	100	100	100	100	Bidang Persandian
		V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Informasi		#REF!					
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif		Perda	1	2	2	4	
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Orang	3	4	5	9	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Informasi (%)		%	100	100	100	100	
						%	100	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan Penerapan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatkan Inovasi Pembangunan Daerah

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui diklat jabatan fungsional perencanaan
2. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat dan penyusunan dokumen perencanaan daerah
3. Membangun pola kemitraan dalam menyediakan data dan informasi pembangunan yang berkualitas secara berkala (Diskominfo, BPS, DKISP dan PD terkait)
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan tepat waktu dan menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan maupun dengan dokumen penganggaran
6. Penyusunan perencanaan sesuai regulasi perencanaan dan berbasis e-planing (SIPD)

7. Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Perangkat daerah, lembaga mitra/LSM dan pemangku kepentingan lainnya
8. Sinkronikasi perencanaan daerah dengan provinsi dan nasional
9. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengkajian untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan
10. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan penelitian dan pengkajian
11. Peningkatan Inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao seperti pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DiskominfoStatper Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah di dukung oleh penelitian dan pengembangan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Bapelitbangda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui diklat jabatan fungsional perencana
			Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat dan penyusunan dokumen perencanaan daerah
		Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan	Membangun pola kemitraan dalam menyediakan data dan informasi pembangunan yang berkualitas secara berkala (Bapelitbangda, BPS, DKISP dan PD terkait)
			Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan tepat waktu dan menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan maupun dengan dokumen penganggaran
			Penyusunan perencanaan sesuai regulasi perencanaan dan berbasis e-planing (SIPD)
	Meningkatnya penerapan kelitbangan dan Inovasi daerah	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Perangkat daerah, lembaga mitra/LSM dan pemangku kepentingan lainnya
			Sinkronikasi perencanaan daerah dengan provinsi dan nasional
		Meningkatkan Penerapan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengkajian untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan
			Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan penelitian dan pengkajian
		Meningkatkan Inovasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kond. KnjPd Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		7	8	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3.00	2,372,913,823	3.03	2,396,641,000	3.05	2,420,606,000	3.05	4,817,247,000		
			Meningkatnya pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	99.90		99.90		99.90		99.90			
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2.75		2.90		3.10		3.10			
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	85.00		90.00		95.00		95.00			
				Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	90.91		95.45		100.00		100.00			
				Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan	%	85.00		87.00		92.00		92.00			
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100	2,088,276,324	100	2,109,159,000	100	2,130,250,000	100	4,239,409,000	Sekretariat	
			Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat		100		100		100		100				
			Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100		100		100		100				
			Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100		100		100		100				
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		19	4,000,000	19	5,500,000	19	6,000,000	19	7,000,000		Kab. RN
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10	2,000,000	10	3,000,000	10	3,000,000	10	6,000,000		Kab. RN
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	2,000,000	9	2,500,000	9	3,000,000	9	5,500,000		Kab. RN
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		38	1,901,867,814	38	1,901,867,814	38	1,968,567,222	38	3,872,775,036		Kab. RN
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26	1,845,827,814	26	1,945,837,900	26	1,902,909,162	26	3,701,086,036		Kab. RN
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12	56,040,000	12	56,040,000	12	65,658,060	12	171,689,000		Kab. RN
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu		100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	20,160,000		Kab. RN
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100	9,000,000	100	9,000,000	100	11,160,000	100	20,160,000		Kab. RN
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah		100	64,134,300	100	93,506,976	100	80,902,568	100	174,409,544		Kab. RN
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	20,000,000		Kab. RN
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	20,495,000	100	20,495,000	100	10,030,515	100	30,525,515		Kab. RN
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	100	10,200,300	100	10,200,300	100	10,200,300	100	20,400,600		Kab. RN
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	23,439,000	100	52,811,676	100	50,671,753	100	103,483,429		
		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	54,224,210	100	54,224,210	100	40,224,210	100	94,448,420		Kab. RN
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100	54,224,210	100	54,224,210	100	40,224,210	100	94,448,420		Kab. RN
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		100	55,050,000	100	45,060,000	100	25,556,000	100	70,616,000		Kab. RN
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100	55,050,000	100	45,060,000	100	25,556,000	100	70,616,000		Kab. RN

II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	75	25,513,000	75	25,768,000	75	26,025,000	75	51,793,000	Bidang Komunikasi	
	7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik											
	15	Pelayanan Informasi Publik		75	25,513,000	75	25,768,000	75	26,025,000	75	51,793,000		Kab. RN
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Meningkatnya layanan informatika daerah		206,006,999		208,067,000		210,147,000		418,214,000	Bidang Informatika	Kab. RN
	17	Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								-		Kab. RN, Prov. NTT
III	18	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan, Aplikasi Donor Darah Rote dan Aplikasi Permata (Project Generasi Emas Rote) 2045	100	99,126,999	100	99,313,997	100	103,167,000	100	202,480,997		Kab. RN
	9	Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah	Prosentase SPBE	75	106,880,000	75	108,753,003	75	106,980,000	75	215,733,003		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data	100	29,127,500	100	29,418,000	100	29,712,000	100	59,130,000	Bidang Statistik	
	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			29,127,500								
	22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	14,739,500	100	15,030,000	100	15,050,000	100	30,080,000		Kab. RN,
	23	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Penyediaan Metadata Statistik Sektoral	4	14,388,000	4	14,388,000	4	14,662,000	4	29,050,000		Kab. RN, Prov. NTT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government		23,990,000		24,229,000	4	24,472,000	4	48,701,000	Bidang Persandian	
	26	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									-		Kab. RN,
	28	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	10	23,990,000	10	24,229,000	10	24,472,000	10	48,701,000		Kab. RN,
				100	2,372,913,823	100	2,396,641,000	100	2,420,606,000	100	4,817,247,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikatorindikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Diskominfostatper Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Diskominfostatper, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1								
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026								
NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET	2025	2026	2026
				2023	2024			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan pelaksanaan SPBE (Permenpan no 5 /2018)	2.99	3.00	3.03	3.05	3.05
2	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE (Permenpan no. 5/2018)	2.60	2.75	2.90	3.10	3.10
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
5	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	Jumlah PD yang terintegrasi dalam sistim satu data / Jumlah Total PD x 100	79.55	90.91	95.45	100.00	100.00
6	Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	Jumlah aplikasi PD yang menerapkan keamanan informasi / Jumlah seluruh aplikasi PD x 100	82.76	85.00	87.00	92.00	92.00

7.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DiskominfoStatper Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah **DiskominfoStatper** Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2								
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026								
NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PEN JELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET			
				2023	2024	2025	2026	2026
Permendagri 86/2017								
Indikator Permendagri 18/2020 LPPD								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / jumlah OPD x 100%	-	-	-	-	-
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan intergrasi / jumlah OPD 100%	-	-	-	-	-
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten / jumlah penduduk x 100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistiK dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah / jumlah OPD x 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistiK dalam melakuka evaluasi pembangunan daerah / jumlah OPD x 100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Jumlah nilai per area keamanan informasi / jumlah area penilaian x 100%	-	-	-	-	-

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. DiskominfoStatper Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. DiskominfoStatper Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao 2025-2026 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur DiskominfoStatper Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra DiskominfoStatper Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari DiskominfoStatper Kabupaten Rote Ndao.

Ra'a, Januari 2024
Kepala DiskominfoStatper Kab. Rote Ndao

Pauwili J. Nggili, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19810725 200604 1 018